

Diterbitkan oleh :



Balai Pengendalian Perubahan Iklim
dan Kebakaran Hutan dan Lahan
Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara



RENCANA AKSI

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Lingkup Balai PPIKHL JabalNusa

2020



RENCANA AKSI

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Lingkup Balai PPIKHL JabalNusa

2020

Disusun oleh :

Atik Murwatingrum, S. Sos
Satrio Sapta Nugroho, S. Hut
Catharina Ugik Margiyatin, S. Sos
Ni Ketut Agustini Sumarni, S. E
Seto Cahyo Nugroho, S. Hut
Ketut Ayu Widiantari
Retno Wulan, S. Si
Mu'linatul Fitriani, A. Md
Muhammad Hafiz, S. Hut
Nur Rais Irfan Aminuddin, A. Md
Pamela Ayu Andrea Jeaneth Suryadi, S. Hut
I Nyoman Yeni Susanti, S. Hut
Ni Ketut Wirni
I Ketut Sutresna
Rosmerry Yuliana, S. Hut
Nur Hayati, S. Sos
Ni Putu Rahayu Anggraeni, S.P

Diterbitkan oleh:



**Balai Pengendalian Perubahan Iklim
dan Kebakaran Hutan dan Lahan
Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara**



RENCANA AKSI

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Lingkup Balai PPIKHL JabalNusa

2020

Penanggungjawab	: Kepala Balai PPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
Tim Penyusun	: Atik Murwatiningrum, S. Sos, Satrio Sapta Nugroho, S. Hut, Catharina Ugik Margiyatin, S. Sos, Ni Ketut Agustini Sumarni, S. E, Seto Cahyo Nugroho, S. Hut, Ketut Ayu Widiyanti, Retno Wulan, S. Si, Mu'linatul Fitriani, A. Md, Muhammad Hafiz, S. Hut, Nur Rais Irfan Aminuddin, A. Md, Pamela Ayu Andrea Jeaneth Suryadi, S. Hut, I Nyoman Yeni Susanti, S. Hut, Ni Ketut Wirni, I Ketut Sutresna, Rosmerry Yuliana, S. Hut, Nur Hayati, S. Sos, Ni Putu Rahayu Anggraeni, S.P
ISBN	: 978-623-93451-2-9
Editor	: Haryo Pambudi, S. Hut., M. Sc ; Endah Sulistyowati, S. Hut ; Pujo Nur Cahyo, S. Si., M. Si ; Teguh Pramono, SE ; Anak Agung Dewi Yuli Krisnawati, S. IP
Desain Sampul dan Layout	: Satrio Sapta Nugroho, S. Hut

Diterbitkan oleh:

Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jl. By Pass Ngurah Rai KM 21, Suwung Kauh - Denpasar . Telepon (0361) 726969
email : bpikhl.jabalnusra@menlhk.go.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang menggunakan isi maupun memperbanyak Prosiding ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk foto copy, cetak, microfilm, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan, atau non-komersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut:

Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (2020). Kiprah BPPIKHL Dalam Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2019. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Kepala Balai
Haryo Pambudi, S. Hut., M. Sc

Kata Pengantar

Buku Rencana Aksi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk upaya balai dalam mengimplementasikan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/MenLHK/Setjen/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui serangkaian proses diskusi pada sub pokja pengendalian perubahan iklim, sub pokja kebakaran hutan dan lahan serta dukungan layanan manajemen dan layanan perkantoran lingkup BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Proses ini sekaligus sebagai sarana PUG dan pembelajaran dalam menerjemahkan secara konkrit ke dalam bentuk program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2020.

Buku ini berisikan penjabaran rencana kerja PUG, strategi pencapaian kinerja Balai Tahun 2020, strategi dan desain pelaksanaan PUG meliputi tahapan dan metode *Gender Analysis Pathway* dan Kelembagaannya serta penganggaran dan tata waktu pelaksanaan.

Atas terselenggaranya penyusunan dan tersusunnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih pada para pihak yang telah memberikan kontribusinya.

Semoga buku ini bermanfaat.

Denpasar, Januari 2020
Kepala Balai

Haryo Pambudi, S. Hut., M. Sc
NIP.19800227 200501 1 003

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Sasaran	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Istilah dan Pengertian.....	4
F. Dasar Hukum	5
BAB II. Rencana Kerja.....	6
BAB III. Strategi dan Desain Pelaksanaan PUG BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	7
BAB IV. Penganggaran dan Tata Waktu.....	12
BAB V. Penutup	16

DAFTAR GAMBAR

- Strategi Pencapaian Kinerja BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 20206
- Perjanjian Kinerja BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2020.....6
- Tahap Gender Analysis Pathway (GAP).....8
- Metode Gender Analysis Pathway (GAP)9
- Desain Implementasi PUG Lingkup BPPIKHL Jabalnusa10
- Kelembagaan PUG BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara11
- Kelembagaan PUG BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara11
- Tata Penganggaran dan Tata Waktu12
- Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Pengarusutamaan Gender Bulan Januari - Maret.....13
- Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Pengarusutamaan Gender Bulan April - Juni14
- Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Pengarusutamaan Gender Bulan Juli - Desember15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Cikal bakal isu gender dalam dunia modern berkembang dari ide perbedaan laki-laki dan perempuan yang membawa pada isu perempuan dan kesetaraan dengan laki-laki. Pendekatan pengarusutamaan gender mulai menjadi isu utama sejak dicanangkannya tahun 1975 sebagai *International Women's Year* yang berpuncak pada acara *World Conference on Women* pertama di Meksiko. Pada *World Conference on Women* kembali digelar di Nairobi pada tahun 1985, pengakuan dan penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan sebagai penerima manfaat, subjek dan agen aktif dalam kebijakan pembangunan menjadi kesepakatan penting. Pendekatan keterlibatan perempuan dianggap sebagai kunci keberhasilan pembangunan di tingkat nasional maupun internasional.

Kritik otokritik muncul menjadi koreksi yang konstruktif atas pembangunan yang berfokus hanya pada perempuan sendiri, yang ternyata tidak menghasilkan perkembangan yang berarti. Fokus pembangunan kemudian bertransisi dari perspektif perempuan saja menjadi perempuan-lelaki serta institusi. Dalam *World Conference on Women* yang ke-4 di Beijing pada tahun 1995 dunia lewat *The Beijing Platform of Action* secara resmi mengakui pengarusutamaan gender sebagai suatu upaya utama untuk mencapai kesetaraan, pemberdayaan dan perdamaian. Komitmen ini menyertakan 189 negara anggota PBB yang hadir dalam konferensi menandatangani deklarasi tersebut, termasuk didalamnya Indonesia, dan berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam setiap sektor pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender kemudian menjadi spirit pada agenda pembangunan global hingga *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menempatkan pencapaian kesetaraan gender dan penguatan posisi perempuan sebagai Tujuan ke-5 SDGs serta 91 target terkait dengan hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Pemerintah Indonesia dengan tegas mendukung kesetaraan gender dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277). Masuknya 19 program responsif gender pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2000-2004 serta keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) menunjukkan semakin kuatnya dukungan terhadap pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender. Pada RPJM 2010-2014 pemerintah menempatkan PUG dalam pembangunan sebagai strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan

Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam proses pembangunan di setiap bidang. Sebagai dasar penyusunan keuangan negara, pemerintah juga telah menyusun PMK Nomor 94 tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Pengesahan DIPA sebagai dasar penyusunan anggaran responsif gender. Komitmen besar pemerintah berlanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 yang menempatkan PUG sebagai salah satu dari (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan nasional. PUG menjadi bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif.

PUG sebagai salah satu strategi yang sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, untuk membantu mengurangi persoalan, persepsi, kebutuhan serta prioritas yang berbeda yang dihadapi perempuan - laki-laki dan kelompok marginal. Perbedaan tersebut tercermin dan terpadu dalam tahapan siklus perencanaan, dan empat fungsi utama manajemen program setiap instansi lembaga maupun organisasi. Siklus tersebut yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Perencanaan yaitu menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas dalam upaya menutup kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Pelaksanaan memastikan bahwa strategi yang disusun mencakup upaya menutup kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki. Pemantauan mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki, dan mengidentifikasi upaya lanjutan untuk memastikan tujuan untuk memastikan tujuan penghapusan kesenjangan gender. Penilaian memastikan bahwa status perempuan maupun laki-laki menjadi setara dan kesenjangan gender berkurang sebagai hasil prakarsa tersebut.

Pembangunan yang telah berjalan selama ini masih menyisakan permasalahan klasik seperti kesenjangan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Tidak hanya seputar laki – laki dan perempuan, namun juga merambah pada kelas umur, kelas pekerjaan, masyarakat desa-kota, kerentanan lingkungan hidup, serta yang lainnya. Permasalahan tersebut kerap kali dikesampingkan sehingga memunculkan persoalan baru seperti marjinalisasi, kemiskinan, subordinasi laki-laki/perempuan, dan juga *stereotype* (pelabelan). Dampak – dampak sosial seperti itulah yang coba untuk diurai dan dikendalikan dengan intervensi pemerintah melalui program kegiatan rutin.

Implementasi intervensi program/kegiatan BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah berusaha mewujudkan PUG melalui program kerjanya di bidang pengendalian perubahan iklim. Dengan merujuk pada Roadmap pelaksanaan PUG Kementerian LHK, BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara berusaha untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Kementerian LHK telah adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki dalam mengatasi permasalahan

lingkungan; memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggara PUG; dan memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian LHK memahami konsep, prinsip dan strategi PUG dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian LHK. Wujud kesetaraan dan keadilan gender berupa: kesempatan yang sama diberikan kepada perempuan – laki-laki dan kelompok marjinal (akses); perempuan laki-laki dan kelompok marjinal dapat berpartisipasi penuh dalam seluruh proses pembangunan (partisipasi); perempuan - laki-laki dan kelompok marjinal diikutkan dalam proses pengambilan keputusan (kontrol) dan pembangunan harus data memberikan manfaat bagi perempuan – laki-laki dan kelompok marjinal (manfaat).

BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara selanjutnya melakukan pemetaan dan pendefinisian strategi implementasi masing-masing program/kegiatan melalui alat *Gender Analysis Pathway* dengan 9 (sembilan) tahap analisa. Dalam pelaksanaannya, BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara membentuk sub pokja perubahan iklim, sub pokja kebakaran hutan dan lahan, layanan dukungan dan manajemen, dan layanan perkantoran, dimana masing – masing telah memiliki jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari rencana Aksi PUG ini adalah memberikan panduan dalam pelaksanaan rencana aksi PUG dalam mewujudkan PUG melalui program kerja Balai di bidang pengendalian perubahan iklim. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya PUG dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim.

C. SASARAN

Sasaran dari rencana aksi PUG ini adalah seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di seluruh wilayah kerja menyertakan aspek PUG.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup rencana aksi PUG ini mencakup substansi desain rencana aksi PUG dan strategi pelaksanaan aksi PUG.

E. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan :

1. Akses adalah peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kemudahan di segala bidang pembangunan.

2. Analisis Gender adalah proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran dan kesenjangan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki serta implikasinya pada perbedaan dalam memperoleh akses, manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya.
3. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman
4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan status, kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
5. Kesenjangan gender adalah suatu kondisi ketika perempuan atau laki-laki tidak dapat menerima akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) pembangunan secara adil.
6. Manfaat adalah hasil yang dirasakan dan dinikmati perempuan dan laki-laki dari pembangunan.
7. Kebijakan/ Program Gender adalah kebijakan/ program yang responsif terhadap aspek-aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan bagi perempuan dan laki-laki dalam setiap tahapan pembangunan.
9. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu PAMK yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
10. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
11. *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender merupakan suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan

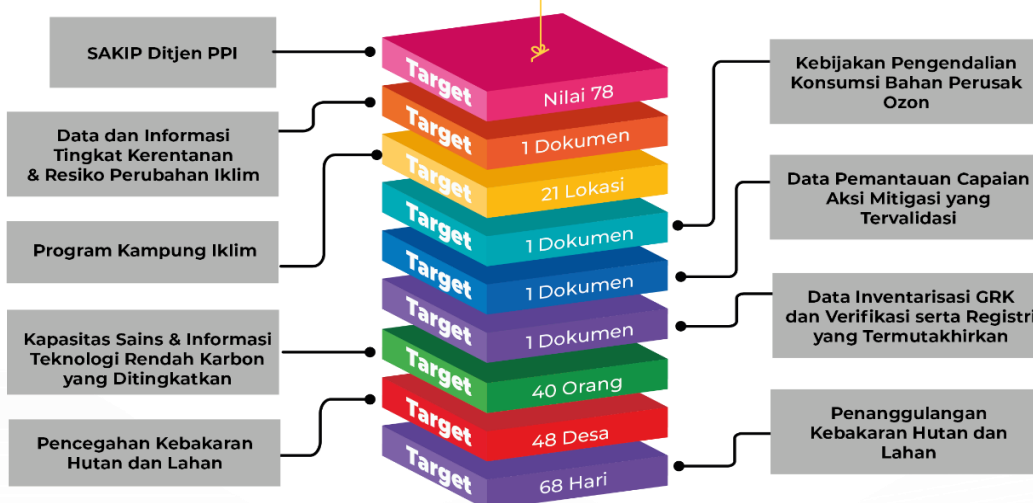
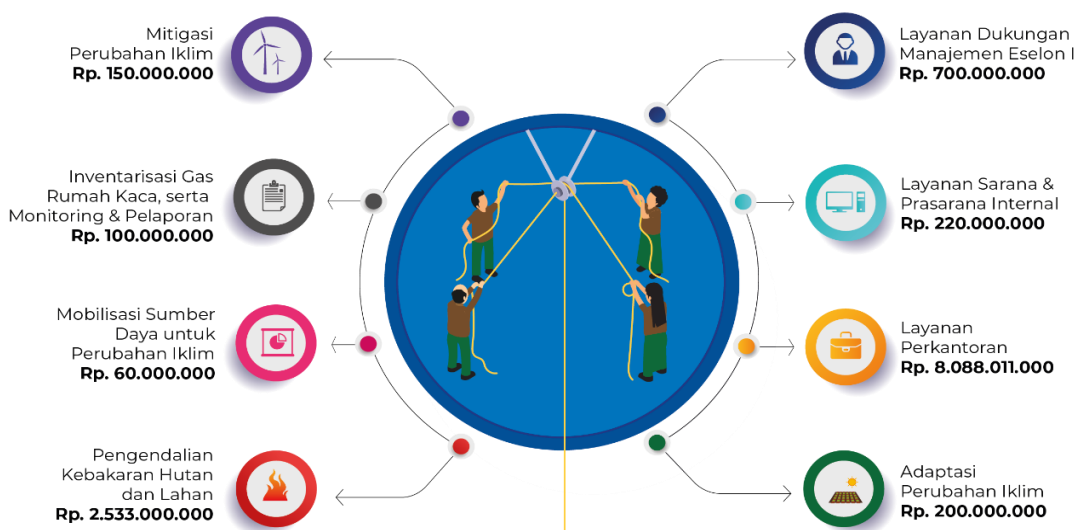
F. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program dan Kegiatan Pembangunan Berperspektif Gender;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/Menlhk/setjen/SET.1/5/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja PUG tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutnan;
7. Surat Keputusan Kepala BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Nomer 05/BPPIKHL.JBN-1/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang susunan sub kelompok kerja PUG BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

BAB II RENCANA KERJA

Arah dan strategi kebijakan BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara mencapai target sasaran dan indikator kinerja pada Tahun 2020 diupayakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan target Renstra BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 2020-2024. Dengan tetap mengacu pada Renstra Ditjen PPI serta mencapai sasaran dan target kinerja tahunan Balai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai dan Ditjen PPI.

STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA BPPIKHL WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2020



PERJANJIAN KINERJA BPPIKHL WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2020

BAB III

STRATEGI DAN DESAIN PELAKSANAAN PUG

BPPIKHL WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

Penyusunan dan pelaksanaan PUG di lingkup BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/Menlhk/setjen/SET.1/5/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; menggunakan metodologi *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender.

GAP merupakan suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. GAP, mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issues) sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut (*Bappenas, 2001*).

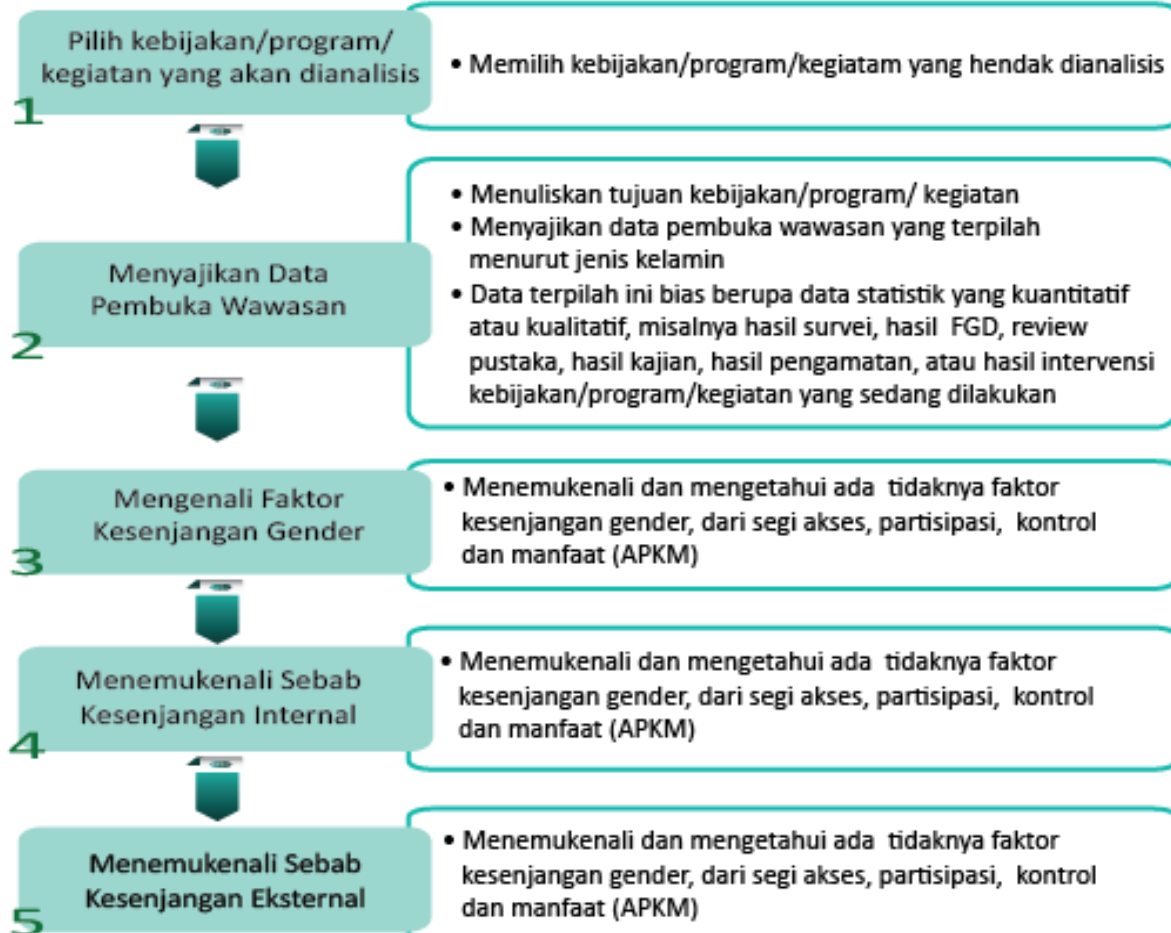
Penyusunan GAP dilaksanakan melalui 9 (sembilan) langkah yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap analisis kebijakan yang responsif gender, tahap formulasi kebijakan yang responsif gender dan tahap pengukuran hasil. Dengan analisis gender model GAP, BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara merumuskan kebijakan/program/kegiatan responsif gender sesuai tugas dan fungsinya.

Gender Analysis Pathway (GAP) dilakukan untuk:

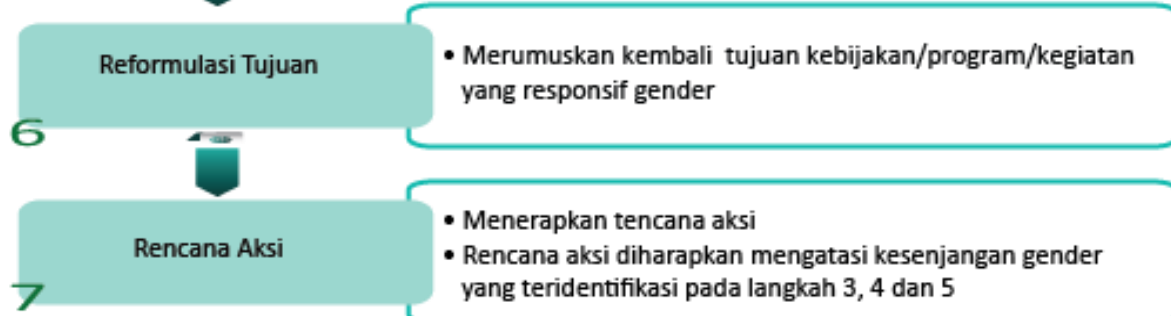
1. Membantu perencana dalam menyusun perencanaan program responsif gender.
2. Mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh warga laki-laki maupun perempuan.
3. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender.
4. Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender.
5. Mengidentifikasi langkah-langkah/ tindakan intervensi yang diperlukan.

Tahap Gender Analysis Pathway (GAP)

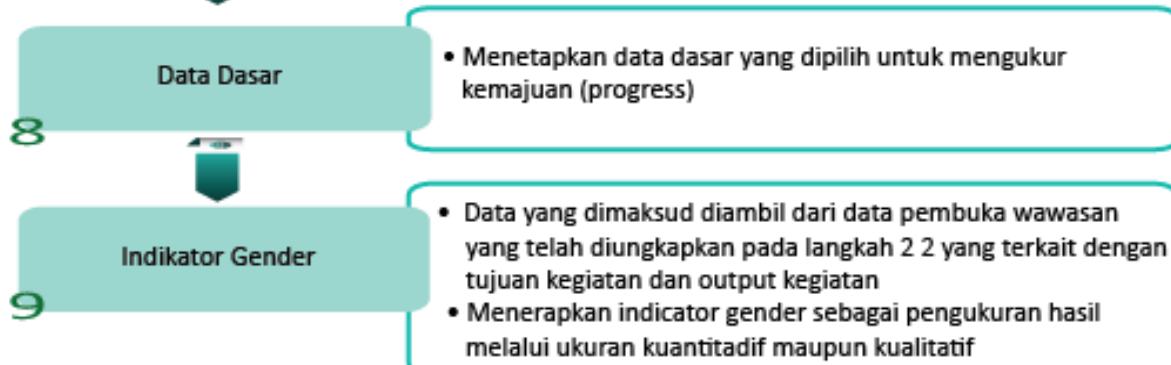
I. ANALISIS KEBLIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER



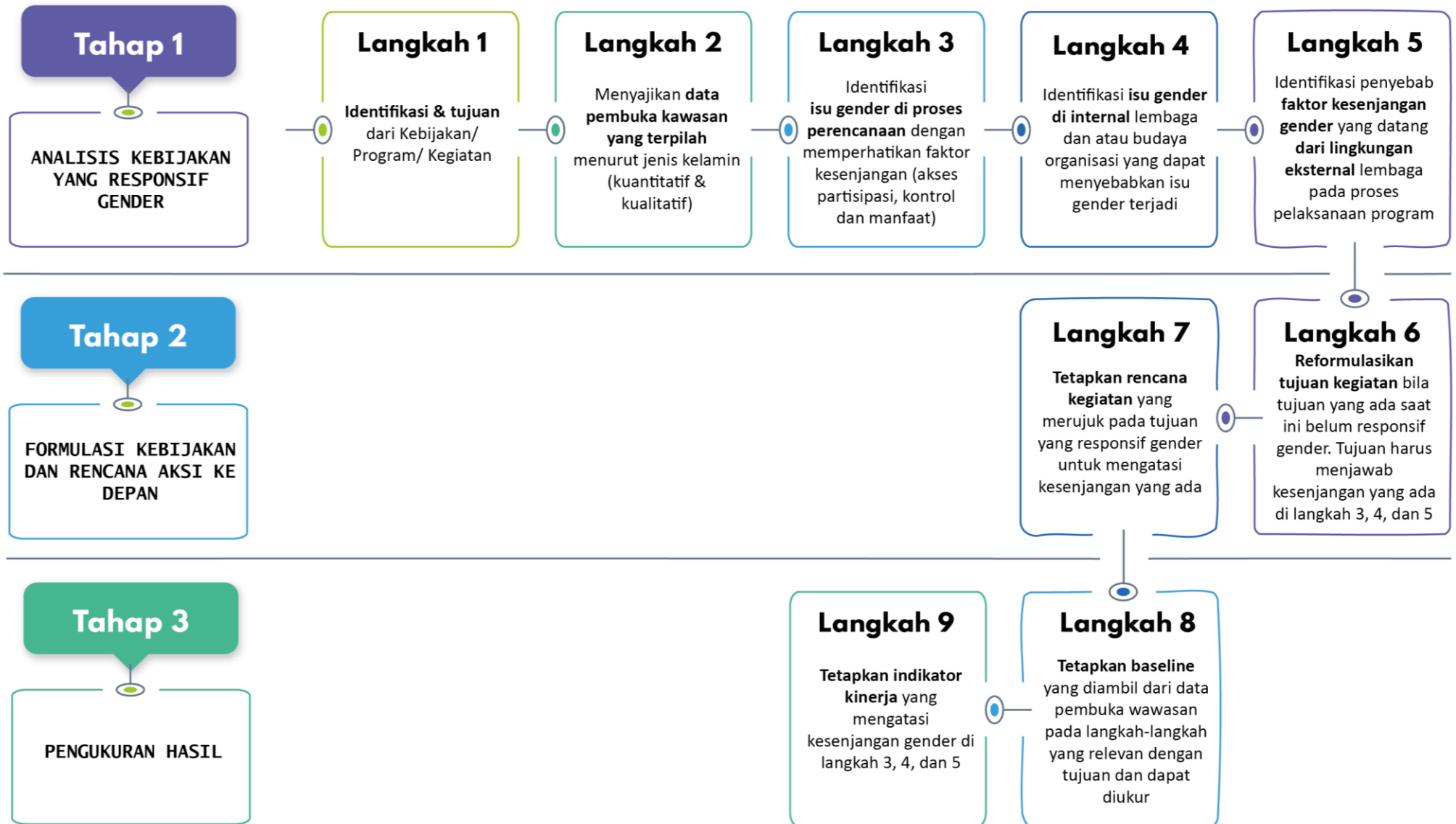
II. FORMULASI KEBLIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER



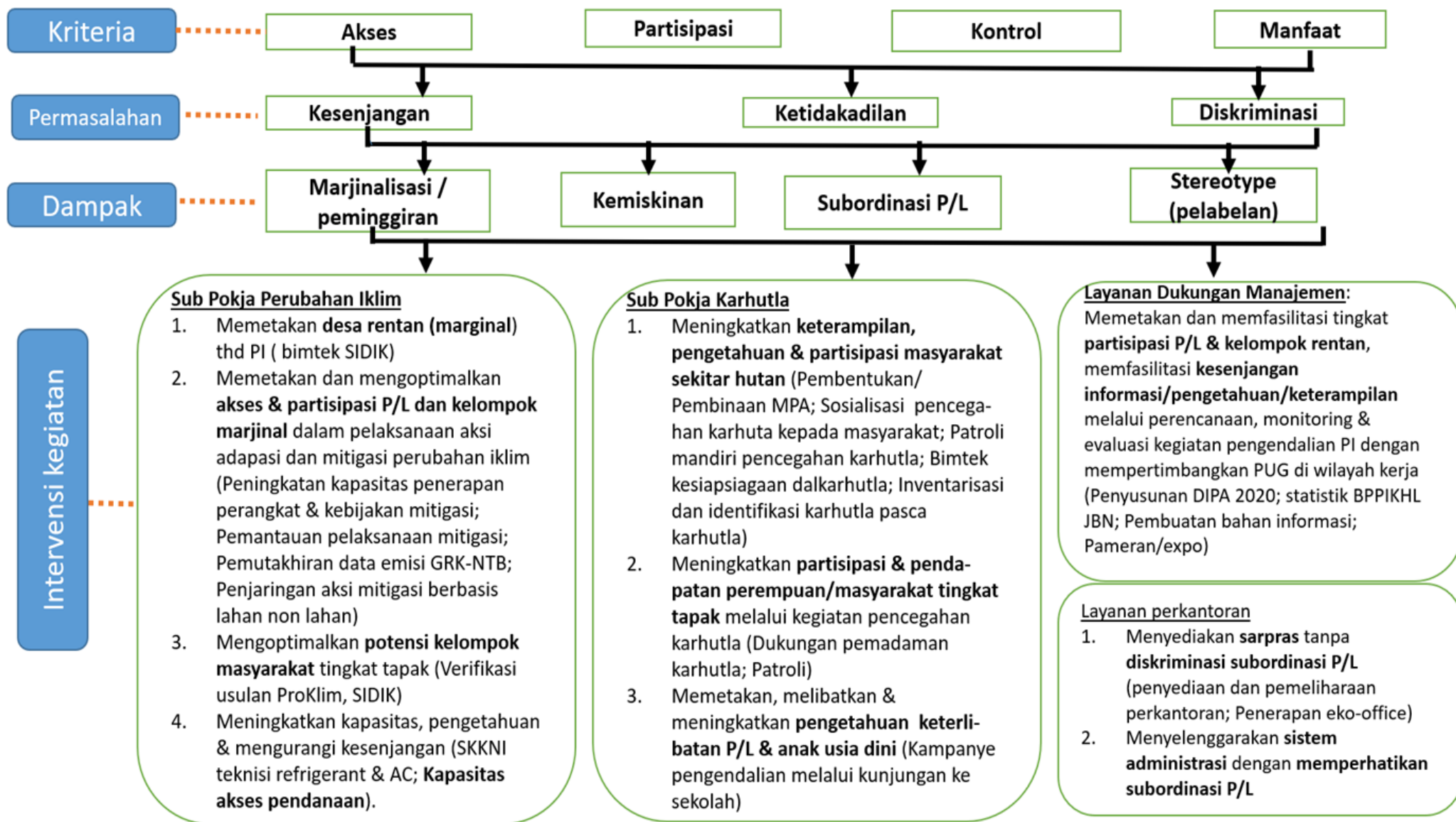
III. PENGUKURAN HASIL



METODE GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)



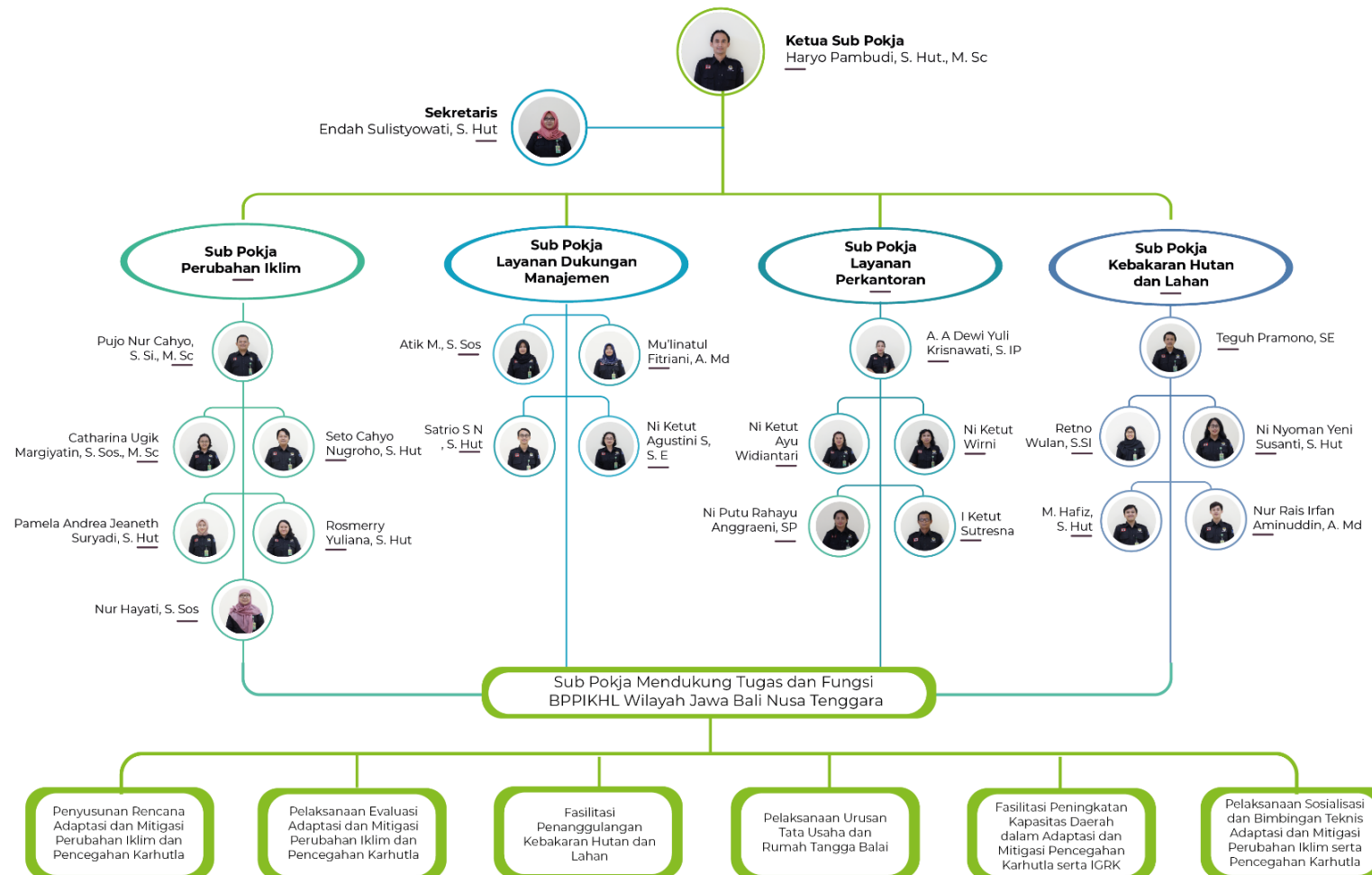
Desain Implementasi PUG Lingkup BPPIKHL Jabalnusa



KELEMBAGAAN

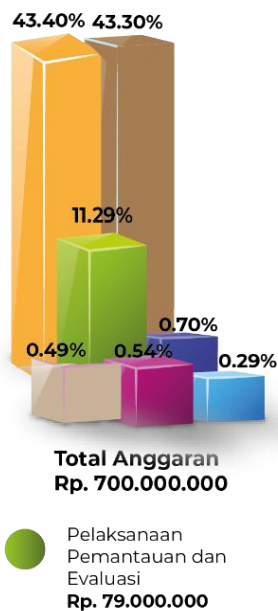
Legalitas kelembagaan PUG pada Balai PPIKHL JBN tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai PPIKHL JBN Nomor :SK. 05/BPPIKHL.JBN-1/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Balai PPIKHL JBN.

KELEMBAGAAN SUB POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BPPIKHL WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA



BAB IV PENGANGGARAN DAN TATA WAKTU

1. Layanan Dukungan Manajemen

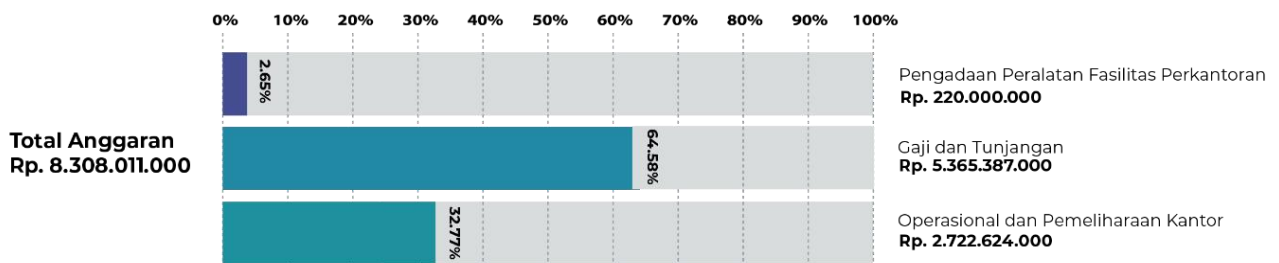


- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran **Rp. 303.100.000**
- Pengelolaan Data dan informasi **Rp. 303.800.000**
- Pelayanan Umum dan Perlengkapan **Rp. 4.900.000**
- Pengelolaan Ketatausahaan **Rp. 3.800.000**
- Pengelolaan Kepegawaian **Rp. 3.400.000**
- Pengelolaan Keuangan **Rp. 2.000.000**
- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi **Rp. 79.000.000**

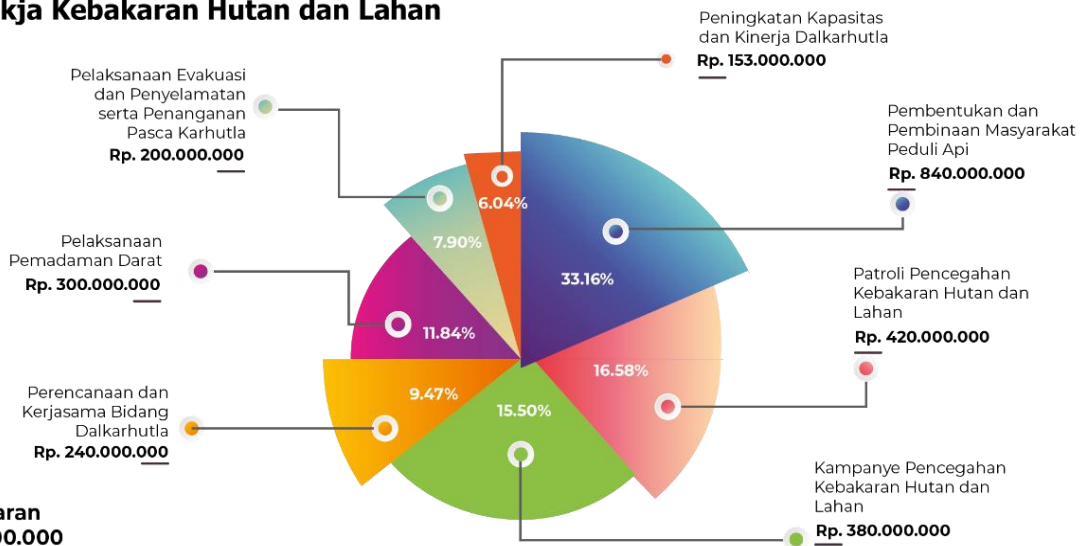
2. Sub Pokja Perubahan Iklim



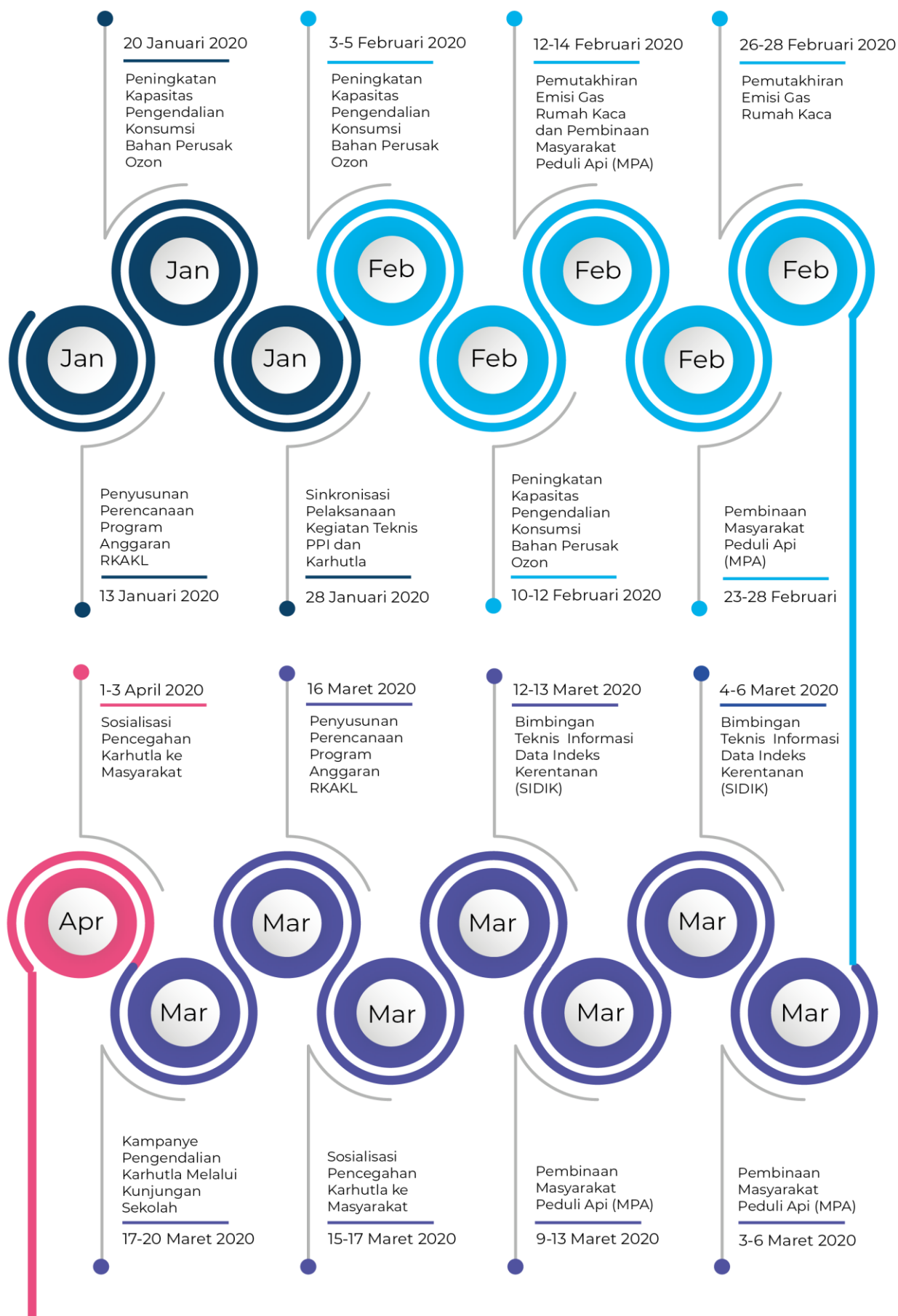
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Perkantoran



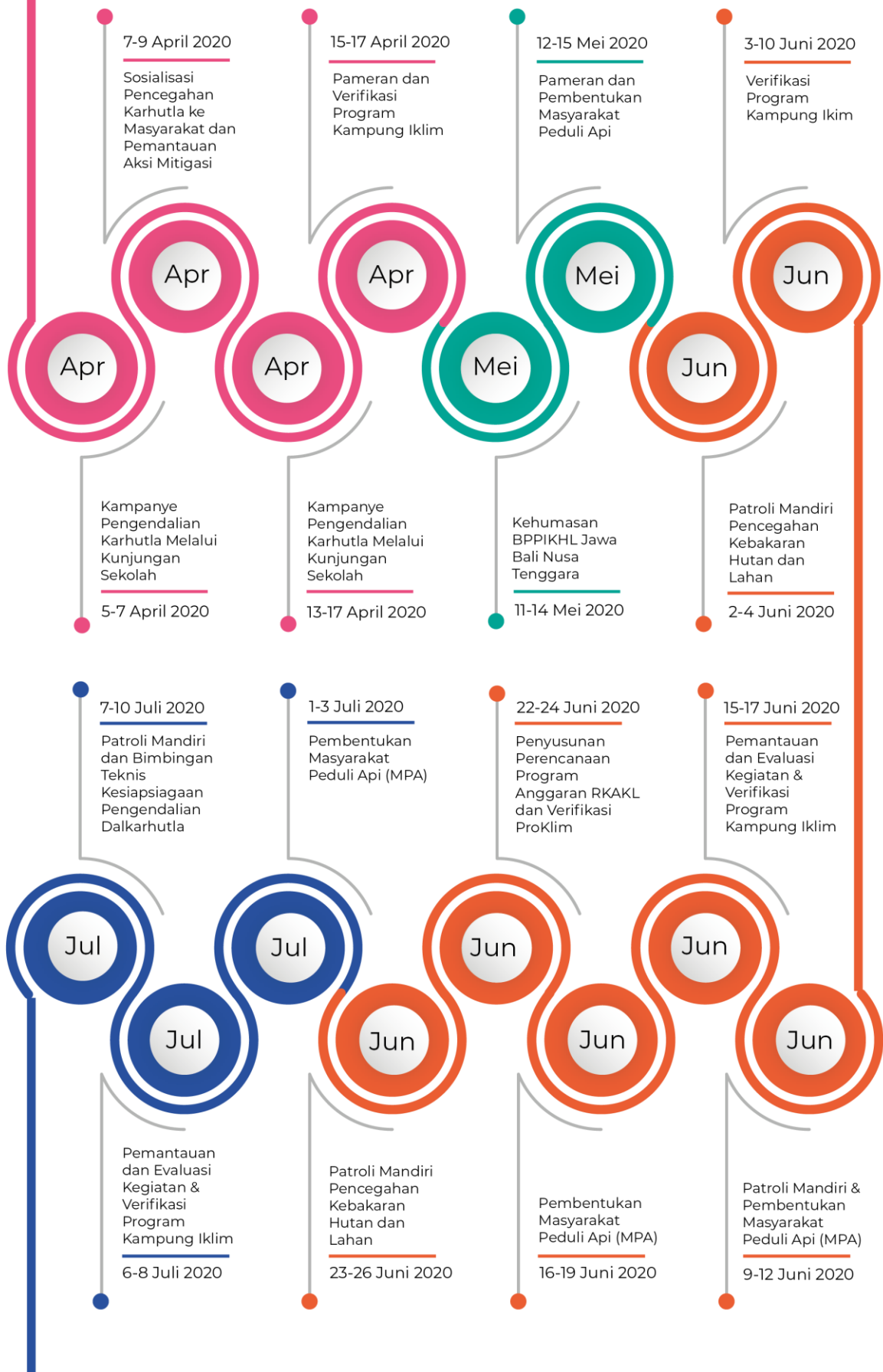
4. Sub Pokja Kebakaran Hutan dan Lahan



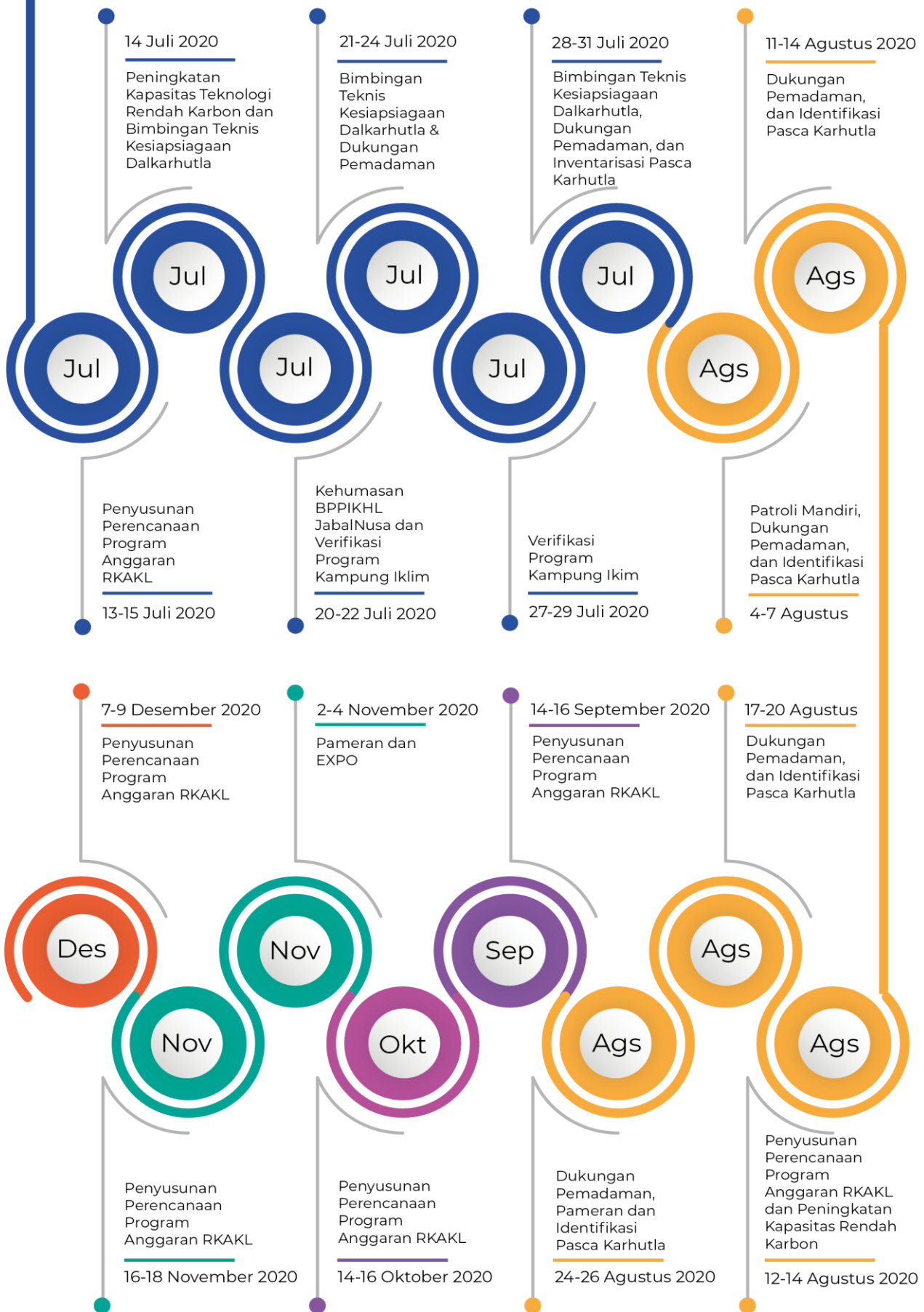
TATA WAKTU PELAKSANAAN AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER



TATA WAKTU PELAKSANAAN AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER



TATA WAKTU PELAKSANAAN AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2020-2024 menempatkan Gender sebagai salah satu pendekatan pengarusutamaan dalam pembangunan yang terimplementasikan dalam seluruh perencanaan, mekanisme kerja, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Balai baik secara internal maupun eksternal. Pendekatan PUG meluas secara substansif menasar pada penguatan kelompok-kelompok marginal sub-marginal dalam upaya pengendalian perubahan iklim di wilayah kerja. Intervensi kegiatan dalam pendekatan PUG dilakukan melalui kelompok kerja (Pokja) Pengendalian Perubahan Iklim dan Pokja Kebakaran Hutan dan Lahan serta Dukungan Layanan Managemen dan Layanan Perkantoran dengan metode GAP. Dalam desain implementasi PUG BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) dilakukan dengan 9 (Sembilan) langkah kerjanya yang kemudian menjadi rencana aksi Balai meliputi :

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya pendekatan PUG dalam kebijakan pembangunan dan pentingnya upaya untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
2. Memetakan desa rentan (marginal) terhadap perubahan iklim melalui bimtek SIDIK;
3. Memetakan dan mengoptimalkan akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dan kelompok marginal dalam pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan kapasitas penerapan perangkat dan kebijakan mitigasi; pemantauan pelaksanaan mitigasi; pemuktahiran data emisi GRK-NTB serta penjaringan aksi mitigasi berbasis lahan dan non lahan;
4. Mengoptimalkan potensi kelompok masyarakat tingkat tapak dalam kegiatan verifikasi usulan Proklamasi dan aplikasi SIDIK;
5. Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan mengurangi kesenjangan dalam kegiatan SKKNI teknisi refrigerant dan AC termasuk didalamnya meningkatkan kapasitas akses pendanaan;
6. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan partisipasi masyarakat sekitar hutan dengan pembentukan/pembinaan MPA; sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat, bimtek kesiapsiagaan dalkarhutla, inventarisasi dan identifikasi karhutla pasca kebakaran hutan dan lahan;

7. Meningkatkan partisipasi dan pendapatan perempuan/masyarakat tingkat tapak melalui kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui kegiatan dukungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dan patroli kebakaran hutan dan lahan;
8. Memetakan, melibatkan dan meningkatkan pengetahuan keterlibatan perempuan dan laki-laki dan anak usia dini dalam kampanye pengendalian melalui kunjungan ke sekolah;
9. Memetakan dan memfasilitasi tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dan kelompok rentan, memfasilitasi kesenjangan informasi/ pengetahuan/ keterampilan melalui perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian perubahan iklim dengan mempertimbangkan pendekatan PUG di wilayah kerja melalui kegiatan penyusunan DIPA 2020, statistik BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, pembuatan bahan informasi dan pameran/expo, Memastikan bahwa alokasi anggaran pembangunan dan penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan akan menjamin adanya manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan dan kelompok marginal terkait lainnya;
10. Dalam layanan dukungan manajemen, menyediakan sarana prasarana tanpa diskriminasi subordinasi perempuan atau laki-laki melalui penyediaan dan pemeliharaan perkantoran dan penerapan eco-office;
11. Menyelenggarakan sistem administrasi dengan memperhatikan subordinasi perempuan dan laki-laki;
12. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan SDM Balai yang komprehensif tentang konsep, prinsip dan analisis gender, serta teknik-teknik fasilitasi PUG.
13. Pelaksanaan sasaran kegiatan dan target output pada Tahun 2020 diupayakan seoptimal mungkin mendukung pencapaian sasaran dan target Renstra BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, mengacu pada Renstra Ditjen PPI serta mensukseskan capaian sasaran dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

LAMPIRAN 1. Tahapan Gender Analysis Pathway Pengarusutamaan Gender Lingkup BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Sub Pokja Perubahan Iklim								
Kegiatan bimbingan teknis Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	PUG ada dalam kegiatan Verifikasi usulan lokasi ProKlim (SDM berdasar jenis kelamin)	Kesenjangan akses informasi dan pengetahuan tentang kerentanan desa dalam mendukung kemampuan adaptasi	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Terwujudnya data dan informasi kerentanan terhadap perubahan iklim dengan menyertakan PUG	Melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas stakeholder untuk melakukan analisis kerentanan desa terhadap perubahan iklim dengan aplikasi SIDIK	Hasil analisis berupa data dan informasi kerentanan terhadap perubahan iklim dapat mendukung dan dimanfaatkan untuk membuat/ menyusun kebijakan pembangunan atau programkerja yang lebih adaptif terhadap dampak negative perubahan iklim khususnya pada kelompok/desa yang rentan	Terjembatannya kesenjangan akses informasi dan pengetahuan pada stakeholder untuk melakukan analisis kondisi kerentanan desa terhadap dampak negatif perubahan iklim.

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verifikasi usulan lokasi ProKlim	Kuantitas PUG dalam kegiatan	Kesenjangan partisipasi di tingkat tapak termasuk keterlibatan kelompok pe rempuan da lam mening katkan kualitas lingkungan hi dup (adaptasi mitigasi peru bahan iklim) diantaranya: ketahanan pa ngan, ketahan an energi, ketahanan ekonomi	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Terverifikasi nya usulan proklam sesuai aturan yang berlaku	Melakukan identifikasi sebagai rekomendasi terhadap potensi lokal, potensi kelompok perempuan dan generasi muda yang dapat terlibat secara proporsional guna pengembangan kegiatan ProKlim di lokasi tersebut.	Hasil pemeriksaan dan pengecekan ke lapangan, mengidentifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lapangan	Proklam yang terverifikasi memenuhi kriteria penyertaan PUG

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur dalam rangka pengendalian bahan perusak ozon (BPO) di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kelompok teknisi refrigerasi dan teknisi tata udara	Para teknisi perorangan atau teknisi yang tidak masuk dalam organisasi/asosiasi teknisi karena ketidaktahuan	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Meningkatkan kapasitas melalui standar kompetensi yang diakui secara nasional dengan kelompok sasaran para teknisi per-orangan, teknisi yang diwadahi dalam asosiasi sekaligus aparatur Pemda	Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur dalam rangka pengendalian bahan perusak ozon (BPO) di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Hasil peningkatan daya saing teknisi refrigerasi dan teknisi tata udara dengan kelompok sasaran di Prov. NTB di pasar bebas ASEAN melalui kompetensi kerja nasional Indonesia (KKNI).	pemberlakuan SKKNI teknisi refrigerasi dan teknisi tata udara pada tahun 2021 dapat terwujud.
Peningkatan kapasitas penerapan	Dominasi peran kelompok laki-laki dalam pelaksanaan	Kesenjangan akses kapasitas/kom	Kemauan partisipasi untuk sadar	Kesenjangan akses,	Meningkatkan kapasitas penerapan	Memfasilitasi peningkatan kapasitas	Jumlah target peserta yang mewujudkan	Target peserta dapat terpenuhi secara proporsional antara

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
perangkat dan kebijakan mitigasi.	aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	petensi teknisi refrigerasi dan teknisi tata udara perorangan	akses dan keterlibatan aktif	keterbatasan informasi	perangkat dan kebijakan mitigasi	penerapan perangkat dan kebijakan mitigasi dalam bentuk pertemuan dengan memperhatikan komposisi gender peserta.	keseimbangan peran gender	kelompok perempuan dan laki-laki, serta kelompok marjinal (akses informasi, pengetahuan) guna mewujudkan keseimbangan peran gender dalam penerapan perangkat dan kebijakan mitigasi.
Pemantauan lapangan pelaksanaan mitigasi party stakeholder dan nonparty stakeholder.	PUG ada dalam kegiatan Peman tauan lapangan pelaksanaan mitigasi party stakeholder dan nonparty stakeholder.	Kesenjangan partisipasi dan keterlibatan kelompok di tingkat tapak dalam meningkatkan kualitas	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Melakukan Pemantauan lapangan pelaksanaan mitigasi party stakeholder	Kegiatan peman tauan lapangan pelaksanaan mitigasi party stakeholder dan nonparty stake holder dilakukan	Tindak lanjutnya yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan mengurangi kesenjangan partisipasi kelompok-	Target Pemantauan lapangan pelaksanaan mitigasi party stakeholder dan nonparty stakeholder berpres pektif Gender

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		lingkungan hidup (mitigasi perubahan iklim)			dan nonparty stakeholder.	salah satu tujuannya adalah untuk memetakan par-tisipasi kelompok di tingkat tapak dalam pelaksanaan mitigasi sektor energy, limbah, pertanian, kehutanan dan IPPU	kelompok yang teridentifikasi sehingga memiliki peran yang proporsional	
Pemutakhiran data emisi gas rumah kaca di Provinsi NTB	PUG ada dalam Pemutakhiran data emisi gas rumah kaca di Provinsi NTB	Kesenjangan akses data emisi GRK dari tingkat nasional ke daerah.	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Melakukan Pemutakhiran data emisi gas rumah kaca di Provinsi NTB	memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam berpartisipasi aktif memutakhirkan	Hasil SIGNSMART dapat dilihat bahwa pengisian data emisi gas rumah kaca Provinsi Nusa Tenggara Barat	Berkurangnya kesenjangan akses data emisi GRK dari tingkat nasional ke daerah dan peningkatan kapasitas

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						data emisi gas rumah kaca di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekaligus memberikan akses data yang terbaru yang ada di tingkat nasional melalui SIGNSMART	masih memerlukan pemutakhiran	pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran SIGNSMART
Penjaringan aksi mitigasi berbasis lahan non lahan.	Kuantitas PUG dalam kegiatan	Kesenjangan partisipasi dan keterlibatan kelompok di tingkat tapak dalam meningkatkan kualitas	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Melakukan penjaringan aksi mitigasi berbasis lahan non lahan	meningkatkan kapasitas dan mengurangi kesenjangan partisipasi kelompok-kelompok yang teridentifikasi	Hasil pemetaan partisipasi kelompok di tingkat tapak dalam pelaksanaan mitigasi sektor energi, limbah, dan IPPU	Terwujudnya kelompok-kelompok yang teridentifikasi memiliki peran yang proporsional dalam pengendalian perubahan iklim dan

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		lingkungan hidup (mitigasi perubahan iklim) masih sering terjadi						berprespektif Gender
Peningkatan kapasitas akses pendanaan di Provinsi Jawa Timur.	Akses pendanaan untuk melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, khususnya di Provinsi Jawa Timur masih perlu dikembangkan	Kesenjangan informasi untuk informasi apa dan bagaimana berbagai pihak dapat mengakses sumber pendanaan yang ada, padahal sumber pendanaan tersedia	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Melaksanakan peningkatan kapasitas akses pendanaan di Provinsi Jawa Timur.	Mengidentifikasi pelaku aksi yang memiliki peluang untuk mengakses dana guna mengembangkan kegiatan aksi dan mitigasi perubahan iklim	Kesenjangan akses pendanaan dan peningkatan kapasitas untuk mengakses pendanaan perubahan iklim akan dijumpai dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas akses pendanaan di Provinsi Jawa Timur.	Meningkatkannya kapasitas akses pendanaan di Provinsi Jawa Timur.

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Sub Pokja Kebakaran Hutan dan Lahan								
Pembentukan/ Pembinaan MPA	Masyarakat di sekitar hutan (kaum termarginalkan) dalam perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	Kesenjangan akses dan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan (kaum termargi nalkan) dalam perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan.	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Terbentuknya MPA ber prespektif Gender	Pembentukan/ pembinaan MPA	Hasil Pembentukan/pembi naan MPA bermanfaat dalam meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat sekitar hutan terutama dalam pencegahan karhutla dan meningkatkan partisipasi dan pendapatan perempuan dalam penyediaan logistik selama pelaksanaan kegiatan.	Jumlah MPA berprespektif Gender

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sosialisasi Pencegahan Karhutla pada Masyarakat	Masyarakat di sekitar hutan (kaum termarginalkan) dalam perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	Kesenjangan masyarakat terhadap akses dan mafaat bagi masyarakat di sekitar hutan (kaum termarginalkan) dalam perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Meningkatnya pengetahuan Pencegahan Karhutla pada masyarakat berprespektif Gender	Meningkatkan keterlibatan dan ketrampilan masyarakat sekitar hutan dalam pencegahan karhutla, sekaligus memberikan tambahan pendapatan selain pendapatan dari pertanian Meningkatkan partisipasi dan pendapatan perempuan dalam penyediaan logistik	Data personal dalam kuantitas dan kualitas berprespektif Gender	Partisipasi peserta dalam pengendalian perubahan iklim berprespektif Gender

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						selama pelaksanaan kegiatan.		
Kampanye pengendalian karhutla melalui kunjungan ke sekolah	Kelompok usia dini merupakan anggota masyarakat yang terkadang mendapatkan akses terhadap informasi yang kurang sesuai dengan umurnya	Kesenjangan partisipasi dan akses pengetahuan bagi kelompok usia dini dalam mendukung upaya pengendalian karhutla	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Tersampainya upaya kampanye perubahan iklim berprespektif Gender	Kegiatan kampanye melibatkan dan peningkatan pengetahuan kelompok usia dini (anak sekolah) di sekitar hutan dalam upaya pengendalian karhutla dengan menggunakan media pembelajaran berupa materi	Data dasar kegiatan dan efek lanjut sasaran	Partisipasi peserta dalam pengendalian perubahan iklim berprespektif Gender

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						pencegahan karhutla terpilah berdasarkan kelompok sasaran sehingga materi mudah untuk dipahami dan membuat suasana belajar yang menyenangkan		
Patroli Mandiri Pencegahan Karhutla	Anggota kelompok Masyarakat Peduli Api dan menyoar pada daerah-daerah penyangga kawasan konservasi yang rawan	Kesenjangan akses dan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan (kaum termarginalkan) dalam	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Menurunnya kebakaran hutan dan lahan	Melibatkan masyarakat sekitar hutan pada kegiatan ini, sekaligus memberikan tambahan pendapatan selain pendapatan dari	Data dasar luasan penurunan kebakaran hutan dan lahan berprespektif gender	Menurunnya luasan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan peras serta masyarakat berprespektif gender

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kebakaran hutan dan lahan	perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan.				pertanian Disisi lain juga akan meningkatkan partisipasi dan pendapatan perempuan dalam penyediaan logistik selama pelaksanaan kegiatan		
Bimtek kesiapsiagaan dalkarhutla	Personil UPT pemangku kawasan	Kesenjangan akses, informasi dan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan (kaum termarginalkan) dalam perlindungan	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Kesiapsiagaan dalkarhutla berprespektif gender	Melakukan bimtek yang telah terpilah berdasarkan kelompok sasarannya untuk memudahkan terkirimnya informasi.	Hasil bimtek dengan materi yang terpilah berprespektif gender	Berkurangnya kesenjangan informasi yang paling baru terkait dalkarhutla berprespektif gender

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		lingkungan hidup dan kehutanan.						
Dukungan pemadaman karhutla	Kawasan consevasi	Kesenjangan akses, informasi dan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan (kaum termarginalkan) dalam perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan.	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Menurunnya kebakaran hutan dan lahan	Balai memberi stimulant untuk meningkatkan partisipasi ma syarakat di se kitar hutan (ka um marginal) dalam rangka pemadaman kar hutla dan juga meningkat kan partisipasi dan pendapatan pe rempuan dalam penyediaan logistik selama	Hasil data dukungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	mengurangi kesenjangan akses, informasi dan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan (kaum termarginalkan) dalam perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						pelaksanaan kegiatan		
Inventarisasi dan Identifikasi Karhutla pasca karhutla	Luas kebakaran hutan dan lahan menurun 12 % pada 2019	Kesenjangan pengetahuan dan ketrampilan dalam menginvetarisasi lokasi pemadaman atau menghitung kerugian akibat karhutla	Kemauan partisipasi untuk sadar akses dan keterlibatan aktif	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Data dasar untuk kebijakan selanjutnya	Melaksanakan kegiatan yang berakibat pada transfer pengetahuan dan partisipasi masyarakat di sekitar hutan dalam melakukan pengukuran luasan, menginvetarisasi jenis vegetasi yang terbakar, dll	Data hasil inventarisasi dan identifikasi karhutla pasca karhutla sebagai metode check and recheck sebelum persetujuan pemberian dukungan pemadaman karhutla	Turunnya kesenjangan pengetahuan dan ketrampilan dalam menginvetarisasi lokasi pemadaman atau menghitung kerugian akibat karhutla

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C. Dukungan Manajemen								
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perubahan Iklim dan Karhutla di Wilayah Kerja	Sejak Balai berdiri 2016 sudah menyertakan PUG	Belum terdata kuantitas dan kualitas gender yang dibahas secara khusus dalam dokumen kegiatan Balai	Tidak mendapat akses informasi formal	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Terbentuknya data series hasil monev yang mampu mengidentifikasi kesenjangan PUG pada sasaran kegiatan, sehingga dapat menguatkan aspek PUG dalam pengambilan kebijakan kegiatan Balai kedepan	Memantau implementasi program BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara melalui kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Perubahan Iklim, Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Sub Bagian Tata Usaha Balai dalam upaya	Hasil pemetaan tingkat pengetahuan dan partisipasi kelompok sasaran dalam aksi pengendalian perubahan iklim. Apakah kelompok sasaran terpilah berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan umur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Balai	Tersusunnya data series yang akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja selanjutnya berprespektif Gender

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						pengendalian perubahan iklim di wilayah kerja		
Penyusunan Statistik Balai PPIKHL Wilayah Jabalnusra Tahun 2020	Sejak Balai berdiri 2016 sudah menyertakan PUG	Pendekatan PUG belum dibahas secara detail dalam dokumen meski data pilah sumberdaya manusia tersedia	Tidak mendapat akses informasi formal	Kesenjangan akses, keterbatasan informasi	Merangkum seluruh aktifitas Balai pada tahun sebelumnya, memuat in formasi aktifitas Balai secara leng kap mulai dari jenis ke giatan, loka si, waktu pelaksanaan, kelompok sasaran, dan	Menyertakan pembahasan PUG dalam dokumen dan pilah data berprespektif gender yang lebih besar	Hasil data statistic dengan pilah data berprespektif gender yang lebih besar	Penyusunan statistik menjadi dukungan sumber informasi penting dalam melibatkan semua pihak dengan mengarusutamakan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Balai dalam mendukung pengendalian perubahan iklim

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjang an Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dokumentasi kegiatan.			
Pembuatan Bahan Informasi Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla	Sejak Balai berdiri 2016 sudah menyertakan PUG	Kuantitas SDM gender masih timpang	Tidak men dapat akses informasi formal	iklim di masyarakat awam, kesen jangan akses informasi dan keterlibatan partisipasi mul tipihak dalam pengendalian perubahan iklim	Menyebarluas kan informasi tentang perubahan iklim dengan menyertakan PUG.	Menyebarluaska n informasi dalam wadah mainstreaming pengendalian perubahan iklim berbasis gender	Data dasar dengan metode penyampaian dan bahan informasi d disesuaikan dengan kelompok sasaran, jenis media informasi, dan bentuk penyajian, sehingga tepat sasaran dan informasi tersampaikan dengan efektif.	Menurunnya kesenjangan akses informasi dan meningkatkan peluang keterlibatan multipihak berpartisipasi dalam pengendalian perubahan iklim.

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pameran Expo dan Hari Aksi Perubahan Iklim Tahun 2020	Sejak Balai berdiri 2016 sudah menyertakan PUG	Kuantitas SDM gender masih timpang	Tidak mendapat akses informasi formal	Rendahnya ketertarikan terhadap isu perubahan iklim di masyarakat awam , kesenjangan akses informasi dan ke terlibatan partisipasi multipihak dalam pengendalian perubahan iklim	Menyebarkan informasi tentang perubahan iklim dengan menyertakan PUG.	Menyebarkan informasi dalam wadah mainstreaming pengendalian perubahan iklim berbasis gender	Data dasar dengan metode penyampaian dan bahan informasi disesuaikan dengan kelompok sasaran, jenis media informasi, dan bentuk penyajian, sehingga tepat sasaran dan informasi tersampaikan dengan efektif.	Jumlah pameran dan efek pameran terhadap pengunjung terkait perubahan iklim berbasis gender

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kehumasan Balai PPIKHL Wilayah Jabalnusra	Sejak Balai berdiri 2016 sudah menyer- takan PUG	Kuantitas SDM gender masih timpang	Tidak men- dapat akses informasi formal	Rendahnya ketertarikan terhadap isu perubahan iklim di masyarakat awam , kesenjangan akses informasi dan keterlibatan partisipasi multipihak dalam pengendalian perubahan iklim	Terbangunya komitmen bersama dalam berjejaring kerja dalam pengendalian perubahan iklim yang menyertakan PUG	Melakukan upa- ya kehumasan dan penyebar- luasan best practice pengu- dalian perubaha- n iklim di la- pangan dalam membangun jejaring kerja seluas-luasnya dalam upaya mengu rangi kese njangan terha dap ilmu penge tahuan dan akses sumber daya	Data dasar jejaring kerja yang berko- mitmen dalam penyertaan PUG pada upaya pengendalian perubahan iklim	Terwujudnya jejaring kerja yang berkomitmen dalam penyertaan PUG pada upaya pengendalian perubahan iklim dan keterlibatan multipihak dalam pengendalian perubahan iklim meningkat.

TAHAP I ; ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:	Langkah 6:	Langkah 7:	Langkah 8:	Langkah 9:
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D. Layanan Perkantoran								
Eco Office	Dukungan kuantitas dan kualitas sapsras mempertimbangkan subordinasi P/L	Peningkatan pelaksanaan kontrol dan pemantauan subordinasi P/L.	Tidak mendapat akses informasi formal	Kegiatan dilakukan dengan mempertimbangan subordinasi P/L	Eco office menjadi protocol dan gaya hidup seluruh pegawai kantor	Kegiatan diimplemetasi kan baik oleh pegawai laki-laki atau perempuan dan cocok pada seluruh rentang umur	Data yang berkaitan dengan eco office dengan pendekatan PUG	Kantor terselenggara dalam suasana eco office dengan pendekatan PUG



Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
Jalan By Pass Ngurah Rai km 21, Suwung Kauh, Telepon (0361)726969
DENPASAR - BALI

ISBN 978-623-93451-2-9



9 786239 345129

